Syahruddin
Husna Roza

Pusat Studi Keuangan Daerah
Fakultas Ekonomi Universitas Andalas

Penentuan Prioritas Proyek Pembangunan Daerah: Kasus Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru

(Setting Priorities in Regional Development Projects: The Case of Public Works Service in Pekanbaru)

Workshop on Strengthening Regional University Capacity for Decentralization

Project 497-0357 / 204-000
Strategic Objective 1
ECG, USAID/Indonesia
Contract No. 497-C-00-98-00045-00

Center for Institutional Reform and the Informal Sector (IRIS)
University of Maryland at College Park

March, 2000

Tim Peneliti

Ketua

Ediharsi, SE, M.Soc.Sc

Anggota

Prof. H. Syahruddin, SE, MA
Dr. Eddy R. Rasyid, M.Com (Hon), Ak
Werry Darta Taifur, SE, MA
Zulkarnaini Ras, SE
Suhairi, SE, MS, Ak
Husna Roza, SE, M.Com (Hon), AK
Masrizal, SE, M.Soc.Sc
Drs. Hefrizal Handra, M.Soc.Sc
Lucky Aminarko, SE, M.Soc.SC

KATA PENGANTAR

Pusat Studi Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi Universitas Andalas telah melaksanakan penelitian tentang pengelolaan keuangan daerah di Indonesia yang dituangkan dalam laporan penelitian yang berjudul ' Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia: Kasus kasus Dalam Administrasi Penerimaan dan Manajemen Keuangan Daerah'. Penelitian ini telah dilakukan pada lima daerah kabupaten dan kota di Indonesia, yaitu Kota Padang di propinsi Sumatera Barat, Kota Palembang di propinsi Sumatera Selatan, Kota Pekanbaru di propinsi Riau, Kabupaten Tanah datar di propinsi Sumatera Barat, dan Kabupaten Gianyar di propinsi Bali. Topik-topik penelitian itu adalah sebagai berikut:

- Penentuan Prioritas Proyek Pembangunan Daerah: Kasus Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru
- Evaluasi Sistem Value for Money dan Analisis Kinerja: Kasus Dinas Kebersihan Kota Padang
- Kinerja Manajemen Pelayanan Publik: Spesialisasi atau Terpadu
- Penyeragaman Administrasi Penerimaan Daerah: Kasus Administrasi Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C di kota Palembang
- Menilai Pajak Daerah: Kasus Pajak Hotel dan Restauran di Kabupaten Tanah Datar

Dalam pelaksanaan penelitian ini, Pusat Studi Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi Universitas Andalas mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Badan Analisa Keuangan dan Moneter, Departemen Keuangan Republik Indonesia atas kepercayaan, kesempatan, dan bantuan yang telah diberikan untuk melaksanakan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia yang telah membantu kelancaran pelaksanaan penelitian. Terakhir, but not the least, terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan dan kerjasamanya dalam penelitian ditujukan kepeda Pemerintah daerah Propinsi, yaitu Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, dan Bali, dan Pemerintah daerah Kota dan kabupaten, yaitu Padang, Pekanbaru, Palembang, Tanah Datar dan Gianyar.

Terakhir, komentar dan kritik atas laporan penelitian adalah sangat dihargai untuk masukan perbaikan.

Padang, Februari 2000
Kepala,

Ediharsi, SE, M.Soc.Sc.

LAPORAN PENELITIAN

PENENTUAN PRIORITAS PROYEK PEMBANGUNAN DAERAH : KASUS DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PEKANBARU

Oleh :
Syahruddin
Husna Roza

PUSAT STUDI KEUANGAN DAERAH
(Centre for Regional Finance Studies)
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2000

PENENTUAN PRIORITAS PROYEK PEMBANGUNAN DAERAH : KASUS DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PEKANBARU

Oleh : - Syahruddin *)
- Husna Roza *)

1. Pendahuluan

Kota Pekanbaru (sebutan baru berdasarkan UU No. 22 tahun 1999) adalah ibu kota Propinsi Riau dengan luas daerah sekitar 632,20 Km persegi dan jumlah penduduk sekitar 401.477 orang dalam tahun 1994. Pekanbaru mempunyai lokasi yang sangat strategis sebagai pusat pengembangan Wilayah di Timur Sumatera disamping Kota Medan di Bahagian Utara. Tidak heran, kota ini mempunyai laju pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibandingkan dengan kota lainnya di Sumatera (Lampiran 1).

APBD Kota Pekanbaru berjumlah sekitar Rp.39.830,9 juta dalam tahun 1995/96. Sekitar 17,5 % dari APBD tersebut dibiayai dengan PAD, sedangkan sisanya sekitar 82,5 % dibiayai dari sumber eksternal. Sekitar Rp.27.827,0 juta dari total APBD digunakan untuk belanja rutin dan sisanya sebesar Rp.12.003,9 juta digunakan untuk belanja pembangunan. Anggaran pembangunan dibagikan kepada 22 instansi yang terdiri dari 12 Dinas dan 10 Non-Dinas. Salah satu diantaranya adalah Dinas PU (Pekerjaan Umum) Kota Pekanbaru yang sekarang dipimpin oleh Ir. Dedi Kusriadi.

Sama seperti kota-kota lainnya di Indonesia, APBD disusun berdasarkan Permendagri No.9 Tahun 1982. Penyusunan anggaran dimulai dengan pelaksanaan Musbang (Musyawarah Pembangunan) pada tingkat Lurah. Musbang dilaksanakan sekitar bulan Maret/April dan kemudian dilanjutkan dengan Temu Karya pada Tingkat Kecamatan sekitar April/Mei. Hasil Temu Karya dibawa ke tingkat yang lebih tinggi yang disebut sebagai Rakorbang II (Rapat Kerja Pembangunan Tingkat II) yang dilaksanakan sekitar bulan Juni/Juli. Semua instansi Regional (Dinas) dan Vertikal (Departemen) merupakan peserta Rakorbang II. Ada tiga sumber informasi yang dibahas dalam Rakorbang II ini yaitu : (*1*) Hasil Temu Karya, (*2*) Usulan Dinas dan Departemen, dan (*3*) RUPTD (Rencana Umum Pembangunan Tahunan Daerah) yang disusun oleh Bappeda Kota Pekanbaru.

Berikut adalah proses penyusunan anggaran pembangunan yang diajukan oleh Dinas PU Kota Pekanbaru tahun 1998/99. Pemilihan tahun anggaran ini didasarkan pada kelengkapan penyediaan informasi mulai dari perencanaan sampai tahap pelaksanaan dan penyelesaian proyek.

2. Prioritas Proyek Dinas PU 1998/99

Untuk tahun anggaran ini Dinas PU Kota Pekanbaru mengusulkan sebanyak 25 proyek pembangunan jalan dan jembatan dengan dana sebesar Rp.5.685 juta (rincian proyek

---

*) Dosen FE-UA/ Peneliti Senior PSKD-FEUA, Padang

terlihat pada Lampiran 2). Setelah melalui pembahasan mendalam mulai dari Rakorbang II dan diskusi Tim Penyusunan Anggaran, akhirnya ditetapkan 4 (empat) proyek pembangunan jalan dan 1 (satu) proyek pembangunan jembatan dengan nilai Rp.1.224,3 juta. Ada 8 (delapan) kriteria yang digunakan untuk pemilihan proyek-proyek ini yaitu :

(1) menunjang sarana pendidikan
(2) menunjang sarana kesehatan
(3) menunjang sarana ibadah
(4) menunjang sarana *home industry*
(5) menunjang sarana kawasan pertanian
(6) menunjang sarana kawasan industri
(7) daerah pengembangan baru
(8) menghindari kemacetan lalu lintas

Yang menarik dari keputusan ini adalah membandingkan nilai satuan berdasarkan Usulan (DUPDA) dan nilai proyek yang disetujui (DIPDA). Perbandingannya terlihat seperti berikut :

Tabel 1. Perbedaan Nilai DUPDA dan DIPDA menurut proyek 1998/99

Nama Proyek	DUPDA		DIPDA	
	Volume	Nilai (Rp Juta)	Volume	Nilai (Rp Juta)
1. Jl. Swakarya	P: 2000 m L: 4 m	280	P: 2000 m L: 4 m	377,4
2. Jl. Bangau Ujung	P: 800 m L: 4 m	112	P: 250 m L: 4 m	59,4
3. Jembatan Beton Jl. Lembaga Pemasyarakatan	P: 8 m L: 9 m	130	P: 12 m L: 4 m	298,5
4. Jl. Pandu dan Jl. Ikhlas	P: 1200 m L: 4 m	168	P: 785 m L: 4 m	272,9
5. Jl. Cumi-cumi, Jl. Patin dan Jl. Mujair	P: 1500 m L: 4 m	210	P: 820 m L: 4 m	216,2
Total Jalan	P: 5500 m L: 4 m	770	P: 3855 m L: 4 m	925,9
Biaya tiap KM*/		140,0		240,2

Catatan: P = panjang dan L = lebar
*/= tidak termasuk jembatan.

Tabel di atas memperlihatkan adanya perbedaan kebutuhan biaya yang besar harga tiap km jalan. DUPDA memperkirakan sebesar Rp.140,0 juta sedangkan berdasarkan DIPDA, nilai jalan tiap km adalah sebesar Rp.240,2 juta. Kebutuhan biaya dalam DIPDA meningkat sekitar 72 % dibandingkan dengan biaya yang telah ditetapkan dalam DUPDA. Angka ini mendekati tingkat inflasi tahun 1998 dan lebih rendah dari kenaikan harga pekerjaan aspal 1997/98-1998/99 (Lampiran 3). Namun perubahan harga standar yang sangat berbeda pada Lampiran 3 ini cukup membingungkan pula. Perbedaan-perbedaan ini mengundang pertanyaan: apakah DUPDA sudah disusun berdasarkan hasil penelitian ?

Pada pihak lain ada yang menggembirakan, yaitu harga satuan proyek yang hampir bersamaan seperti terlihat pada Tabel berikut :

Tabel 2. Harga Bangunan Jalan Tiap Km Menurut Jenis Kegiatan (Rp juta)

Kegiatan	Proyek			
	1	2	4	5
1. Persiapan	3,30	20,80	7,26	6,95
2. Drainase	-	23,60	126,88	82,56
3. Pekerjaan Tanah	16,45	20,00	18,47	12,80
4. Subbase dan Base	31,65	31,60	31,59	27,68
5. Pelampisan Pemukiman Jalan	120,10	120,00	120,13	105,12
6. Bangunan - bangunan	-	-	6,62	1,34
7. Rehabilitasi Jalan	-	-	-	-
8. Lain-lain	-	-	4,97	3,41
Jumlah	171,55	216,00	316,05	239,63

Catatan : Nomor proyek sama dengan nama proyek pada Tabel 1.

Sumber : Dikutip dari Rekapitulasi LK proyek (Lampiran 4)

Dengan anggapan kualitas ditentukan oleh kegiatan butir 5 yaitu pelampisan pemukiman jalan, maka berarti tidak terdapat perbedaan kualitas jalan 1,2 dan 4. Sedangkan jalan 5 mempunyai kualitas lebih rendah dari tiga jalan lainnya. Kegiatan sub-base dan base juga tidak mempunyai perbedaan yang berarti pada keempat lokasi jalan yang bersangkutan.

Disamping itu, kegiatan persiapan dan pekerjaan tanah tiap km jalan juga mengalami perbedaan yang cukup berarti antara satu proyek dengan proyek lain. Proyek 2 membutuhkan biaya yang cukup besar untuk kedua jenis kegiatan ini. Proyek 1,4, dan 5 membutuhkan biaya yang besar perbedaannya. Kesemua informasi ini akan menghasilkan pertanyaan tentang penggunaan standar harga dalam praktek. Betulkah standar harga dipakai dalam praktek penyusunan anggaran proyek ?

3. Prioritas Proyek dan Instrumen Perencanaan Lainnya

Sesuai dengan ungkapan Sekretaris Bappeda dan Kepala Bahagian Penyusunan Program, kegiatan ini merupakan bagian yang tersulit dalam bidang perencanaan. Kesulitan itu bermula dari masalah ketersediaan data dan sumber daya manusia terampil yang mampu menyusun perencanaan dengan baik dan akhirnya sampai pada perilaku aparatur terkait.

Data yang digunakan untuk menyusun RUTRK dan Repelita VI adalah berbeda (lihat Lampiran 6 dan 7 pada kasus yang bersangkutan). RUTRK mempunyai data paling akhir adalah tahun 1991. Sedangkan Repelita VI mempunyai data kondisi jalan terakhir adalah tahun 1992. Kemudian terdapat pula perbedaan data panjang jalan antara kedua sumber tersebut untuk tahun yang sama. Data jalan 1990 dalam RUTRK adalah sama dengan data jalan 1989 oleh Repelita VI. Perbedaan akan semakin menjadi besar jika diperbandingkan jalan menurut kelompok rincian tertentu.

Masalah kedua adalah berhubungan dengan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada pada Kota Pekanbaru dalam kaitannya dengan penyusunan berbagai instrumen perencanaan yang ada. RUTRK sudah menjelaskan arah pengembangan perekonomian kota yaitu sebagai kota perdagangan yang didukung oleh sektor perindustrian. Sedangkan sektor lainnya dijadikan sebagai penunjang kedua sektor ini. Kemudian juga sudah ditetapkan arah pembangunan kota. Arah ke Utara adalah bertujuan untuk pemukiman penduduk, Perawang sebagai wilayah pengembangan industri dan pelabuhan Pekanbaru sebagai pusat hubungan keluar daerah melalui angkutan air (sungai). Untuk perdagangan lokal ditetapkan bagian Utara Jl Sudirman, Jl. Nangka dan sebagian Jl. Harapan. Sedangkan Jl. Riau dan Jl. Arengka dijadikan sebagai kegiatan yang menghubungkan Pekanbaru ke luar daerah melalui Angkutan Darat.

Pada pihak lain, Repelita VI yang diharapkan dapat menjabarkan lebih luas kebijaksanaan yang telah ditetapkan dalam RUTRK, ternyata tidak dapat berbuat banyak. Target pembangunan Angkutan Darat yang ada hanyalah perubahan panjang jalan selama periode Repelita VI yaitu 773,8 km pada tahun 1993 berubah menjadi 816,9 km pada tahun 1998 atau bertambah sekitar 8,6 km setiap tahun. Tidak ada target perubahan kondisi jalan seperti terlihat pada Lampiran 6 dan 7 kasus. Apakah jalan aspal akan bertambah terus seperti terlihat pada Lampiran 7 kasus dan jalan tanah akan berkurang ?. Yang agak rinci terbahas adalah Rencana Pengembangan Fasilitas Angkutan Jalan Raya (Lampiran 8 kasus).

Harapan terakhir untuk perencanaan yang rinci adalah pada RUPTD. Secara konsep RUPTD 1997/1998 atau 1999/2000 merupakan penjabaran lebih rinci dari Repelita VI. Harapan ini nampaknya tidak dapat diwujudkan. RUPTD Kota Pekanbaru masih bersifat fleksibel. Belum ada target yang jelas mengenai proyek yang akan dibangun dalam tahun tertentu. Dari segi perencanaan, RUPTD tidak berbeda banyak dengan Repelita, masih sama bersifat fleksibel.

Disamping rendahnya kualitas SDM yang tersedia sebagai penyebab pada kualitas perencanaan, setelah itu ditambah pula dengan perilaku aparatur yang tidak mendukung.

Kedua faktor ini mempunyai kemungkinan berlaku sama. Perilaku negatif dalam kegiatan penyusunan perencanaan seperti diungkapkan oleh Kepala Bahagian Penyusunan Program tentang adanya hubungan positif antara proyek dengan kekayaan seorang pejabat (aparatur) menghasilkan kesulitan dalam penentuan prioritas pembangunan yang akan dibiayai oleh APBD. Aparatur lebih cenderung mengejar proyek dari pada melakukan kegiatan perencanaan, sebab kegiatan perencanaan tidak menghasilkan pendapatan tambahan bagi mereka yang mengerjakannya (dampak negatif birokrasi).

Disamping itu, pengawasan terhadap kegiatan perencanaan relatif lebih sederhana. Institusi yang berwenang untuk melakukan pengawasan seperti BPKP atau Inspektorat belum mempunyai keahlian dalam menilai hasil pekerjaan perencanaan. Penilaian lebih banyak di dasarkan kepada "ada laporan" saja dan dilanjutkan dengan pemeriksaan administrasi keuangan. Kesimpulan ini sesuai dengan ungkapan BPKP tentang temuan-temuan pemeriksaan yang terjadi. Ada sepuluh bentuk temuan yang ada (lihat kasus). Dari kesemua temuan tersebut tidak satu butirpun yang menyangkut pemeriksaan terhadap pencapaian tujuan kegiatan/proyek. Dalam hal perencanaan yang diperiksa hanyalah sebatas ada laporan atau tidak ada laporan, tanpa mendalami isi laporan tersebut.

Oleh karena itu, Dinas PU Kota Pekanbaru untuk tahun 1998/1999 mengajukan sebanyak 25 proyek dengan kebutuhan dana sebesar Rp.5.685 juta. Sedangkan yang dibiayai adalah lima proyek dengan jumlah dana sebesar Rp.1.224,3 juta. Jadi berarti proyek yang disetujui berada sekitar 21,5 % dari usulan semula.

4. Identifikasi Permasalahan

Persoalan *pertama* yang muncul adalah kelemahan dalam penentuan prioritas proyek. Nampaknya pemilikan proyek untuk tahun anggaran tertentu lebih banyak dipengaruhi oleh pendekatan dari pada melaksanakan norma dan prinsip penyusunan anggaran. Ada lima norma dan prinsip penyusunan anggaran yaitu: (*1*) keadilan, (*2*) efisiensi dan efektivitas, (*3*) berimbang, (*4*) disiplin anggaran, dan (*5*) transportasi dan akuntabilitas (lihat laporan Bappenas tentang: Pokok-Pokok Kebijaksanaan Reformasi Pembangunan Daerah dan Pemanfaatan Dana Pembangunan Daerah TA. 1999/2000). Situasi seperti ini tidak hanya terjadi di Kota Pekanbaru, tetapi mungkin juga di Kota lain dan bahkan mungkin juga di tingkat nasional. Kesimpulan ini ditandai oleh maraknya persoalan KKN yang sampai sekarang masih sulit untuk diatasi.

Ada dua faktor yang mungkin berpengaruh terhadap cara pemilikan proyek diatas yaitu *pertama*, kurangnya pengetahuan mengenai teori dan teknik perencanaan (terutama perencanaan proyek) dan *kedua*, metode pemilihan proyek dengan pendekatan ini lebih disukai. Kedua kemungkinan ini mempunyai probabiliti berlaku sama. Pengetahuan mengenai teknik perencanaan telah lama diajarkan dan dikembangkan oleh LPEM-FEUI dengan Program PPN nya. Kemudian program ini diperluas pada tiga Universitas lainnya : UGM, Unsyiah, dan Unhas dengan Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Jadi dengan demikian jumlah alumni keempat pusat pelatihan ini tentu sudah besar dan sudah ada pada setiap dati II di Indonesia. Namun mutu SDM yang dijumpai di Kota Pekanbaru masih saja tetap rendah menurut pernyataan instansi terkait.

Persoalan *kedua* adalah penentuan prioritas penelitian. APBD setiap tahunnya mengeluarkan sejumlah dana untuk penelitian. Dengan adanya perbedaan volume pekerjaan dalam DUPDA dengan DIPDA berarti DUPDA disusun belum berdasarkan penelitian. Untuk jalan perbedaan terlihat pada panjang jalan yang dibangun. Proyek (1) yaitu Jl. Swakarya mempunyai panjang yang sama. Sedangkan proyek (2), Jl. Bangau Ujung mengalami perubahan panjang yang besar sekali yaitu dari 800 m dalam DUPDA menjadi 250 M dalam DIPDA. Begitu juga halnya dengan proyek (4), Jl. Pandu dan Jl. Ikhlas dan proyek (5), Jl. Cumi-Cumi, Jl. Paku dan Jl. Mujair. Jembatan proyek (3), mengalami perubahan panjang dan lebar. Dari indikasi ini jelas terlihat belum adanya penelitian pendahuluan sebelum penyusunan DUPDA. Sedangkan pertanyaan berikut adalah apakah dengan adanya perubahan ini tidak akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan proyek ? Apakah tidak lebih baik menyelesaikan satu proyek sesuai rencana dibandingkan dengan memotong satu proyek ?

Persoalan *ketiga*, adalah penggunaan standar harga. Apakah benar standar harga yang ada telah digunakan untuk menyusun proyek pisik tertentu ? Jika sudah, kenapa harga setiap km jalan berbeda jauh antara DUPDA dengan DIPDA ? Waktu penyusunan DUPDA dengan DIPDA tidak berbeda jauh.

Terakhir menyangkut perilaku aparatur. Saya kira masalah perilaku ini adalah berlaku sama, tidak saja ditingkat daerah, propinsi, bahkan tidak kalah serunya di tingkat pusat. Masyarakat menyebutnya dengan istilah KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme). Perilaku aparatur ini sangat berpengaruh dalam menentukan prioritas proyek dan berpengaruh negatif terhadap pengembangan profesionalisme. Kreativitas aparatur tidak berkembang akibat ada berbagai ketentuan yang harus diikuti. Kesemua ini tidak terlepas dari kurangnya penguasaan fungsi Negara dalam bidang ekonomi oleh aparatur.

5. Penutup

Perlu perubahan-perubahan yang mendasar dalam rangka meningkatkan kemampuan aparat menyusun prioritas proyek berdasarkan norma dan prinsip anggaran. Perubahan ini meliputi: perilaku aparat, pengetahuan mengenai perencanaan dan yang paling utama adalah pengamalan fungsi Negara dalam bidang ekonomi. Sulit untuk mewujudkan kesemua ini dalam waktu pendek, kecuali ada kesungguhan dan keseriusan semua pihak yang sampai sekarang belum memperlihatkan tanda-tanda kearah itu.

DAFTAR BACAAN

1. Berbagai Laporan Dinas PU Kotamadya Pekanbaru.
2. Devas, Nick, dkk. (1989). Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Diterjemahkan Oleh Masri Masis, UI-Press, Jakarta.
3. Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru tentang "Penjabaran Realisasi Pendapatan, Kegiatan / Pasal dan Proyek Perhitungan APBD tahun 1997/98.
4. Mamesah, Drs. D.J.(1995). Sistem Administrasi Keuangan Daerah. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
5. Nota Keuangan APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru 19978/98.
6. Nota Keuangan dan RAPBN 1998/99.
7. Pokok-pokok Kebijaksanaan Pengawasan dan Praktek / Pelaksanaan Pengawasan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) Tahun 1999/2000. BPKP Perwakilan Propinsi Riau.
8. Pokok-Pokok Kebijaksanaan Reformasi Pembangunan Daerah dan Pemanfaatan Dana Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 Oleh Bappenas
9. Rencana Umum Pembangunan Tahunan Daerah (RUPTD) 1997/98, Kotamadya Pekanbaru.
10. Rencana Umum Pembangunan Tahunan Daerah (RUPTD), 1999/2000, Kotamadya Pekanbaru.
11. Rencana Umum Tata Ruang Kota Pekanbaru 1994-2004.
12. Repelita VI Kotamadya Pekanbaru.
13. Risalah Pandangan Umum, Laporan Komisi dan Tanggapan Fraksi DPRD Kodya Dati II Pekanbaru Pada Sidang Pleno DPRD Dati II Pekenbaru 1998/1999.
14. Standar Harga dan Jasa Untuk Keperluan Pemerintah Propinsi Dati I Riau Tahun 1997/98 dan 1998/99.

Lampiran 1. **Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Umur 5 Tahun Keatas Kotamadya di Sumatera, 1980, 1990, 1995**

Kotamadya	Jumlah Penduduk			Laju Pertumbuhan (%)	
	1980	1990	1995	1980-1990	1990-1995
Banda Aceh	-	79,904	254,912	-	26.11
Sabang	3,828	10,345	22,324	10.45	16.63
Sibolga	18,033	30,437	67,522	5.37	17.28
Tanjung Balai	11,431	46,384	97,330	15.03	15.98
Kota Pmt.Siantar	54,405	99,617	205,728	6.24	15.61
Tibing Tinggi	23,718	52,222	116,865	8.21	17.48
Medan	415,117	764,714	1,692,243	6.30	17.22
Binjai	22,818	80,399	183,781	13.42	17.98
Padang	153,157	281,792	638,357	6.29	17.77
Solok	10,004	19,039	42,523	6.65	17.43
Sawahlunto	5,485	6,823	49,700	2.21	48.76
Padang Panjang	13,980	17,936	35,888	2.52	14.88
Bukittinggi	29,880	38,044	82,654	2.44	16.79
Payakumbuh	24,169	42,182	86,472	5.73	15.44
Pekanbaru	60,970	169,223	487,126	10.75	23.55
Batam	-	40,213	144,189	-	29.10
Jambi	66,494	147,249	361,419	8.27	19.67
Palembang	233,843	502,670	1,207,469	7.95	19.16
Pakal Pinang	30,088	49,996	111,572	5.21	17.42
Bengkulu	20,958	71,124	230,847	13.00	26.55
Bandar Lampung	86,448	276,964	737,988	12.35	21.65

Sumber : BPS. Sensus Penduduk 1980,1990 dan Survey Penduduk Antar Sensus 1995.

Lampiran 2. **Rekapitulasi Daftar Usulan Proyek BPJK Tahun 1998/1999 (Rp. Juta).**

No	Proyek / Lokasi	Sasaran / Kegiatan	Tingkat Persiapan	Biaya
1	Pemeliharaan jalan jembatan (Swakelola) di Kodya Pekanbaru	Sasaran: *Meningkatkan kualitas jalan Kegiatan: *Perbaikan Aspal*: -Rusak Berat : 3.000 M2 -Rusak Sedang : 1.700 M2 -Rusak Ringan : 2.500 M2 *Perbaikan Saluran Selokan* -Panjang : 2.500 M2 *Perbaikan Gorong-gorong :* -Panjang : 30 M	Baru	300,-
2	Pengaspalan Jalan Swakarya (Ruas 570) di Kecamatan Tampan	Kegiatan: *Pengaspalan*; -Panjang : 2,0 KM -Lebar : 4 M	Baru	280,-
3	Pengaspalan Jalan Datuk Setia Maharaja (Jl.Parit PU) Lanjutan (Ruas 894) di Kecamatan Bukitraya	Kegiatan: *Pengaspalan*: -Panjang : 3,5 KM -Lebar : 4 M	Baru	490,-
4	Pengaspalan Penetrasi Jalan Harapan dan Jalan Kurnia (Ruas 248, 777) di Kecamatan Rumbai	Kegiatan: *Pengaspalan Penetrasi*: -Panjang : 2,5 KM -Lebar : 4 M *Pembuatan parit batu kali* : -Panjang : 2.500 M	Baru	260,-
5	Pengaspalan Jalan Nenas (Ruas 255) di Kecamatan Senapelan	Kegiatan: *Pengaspalan*: -Panjang : 0,200 KM -Lebar : 4 M *Pembuatan parit batu kali*: -Panjang : 200 M	Baru	40
6	Pengaspalan Jalan Bangau Ujung (Ruas 136) di Kecamatan Sukajadi	Kegiatan: *Pengaspalan*: -Panjang : 0,800 KM -Lebar : 4 M	Baru	112
7	Pembuatan Jembatan Beton Jl. Lembaga Pemasyarakatan (Ruas 234) di Kecamatan Sail	Kegiatan: *Pembuatan Jembatan Beton*: -Panjang : 8 M -Lebar : 9 M	Baru	130

Lanjutan....

No	Proyek / Lokasi	Sasaran / Kegiatan	Tingkat Persiapan	Biaya
8	Pengaspalan Hotmix Jalan Lingga, Batam, Enggano, Serasan, Penyengat, Rangsang dan Jalan M. Dahlan (Ruas 011, 022, 021, 020, 017, 019) di Kecamatan Pekanbaru Kota	Kegiatan: *Pengaspalan Hotmix*: -Panjang : 1,5 KM -Lebar : 5-6 M	Baru	475
9	Pengaspalan Penetrasi Jalan Hijrah dan Pembuatan Parit Batu Kali Jl. Kuantan I (Ruas 608, 120) di Kecamatan Limapuluh	Kegiatan: *Penetrasi*: -Panjang : 0,200 KM -Lebar : 4 M *Pembuatan Parit Batu Kali*: -Panjang : 400 M	Baru	51
10	Pembuatan Jembatan Jalan Pandan (Ruas 206) di Kecamatan Sail	Kegiatan: *Pembuatan Jembatan Beton*: -Panjang : 8 M -Lebar : 7 M	Baru	120
11	Pelebaran dan Pembuatan Parit Batu Kali Jalan Lumba-lumba (Ruas 618) di Kecamatan Bukitraya	Kegiatan: Pelebaran/Pembuatan Parit Batu Kali, Panjang : 2.000 M	Baru	250
12	Pengaspalan Penetrasi Jalan Sri Indra (Ruas 542) di Kecamatan Rumbai	Kegiatan: *Pengaspalan Penetrasi*: -Panjang : 1,00 KM -Lebar : 4 M *Pembuatan Parit Batu Kali* : -Panjang : 2.500 M	Baru	285
13	Pengaspalan Jalan Dahlia Indah (Ruas 868) di Kecamatan Bukitraya	Kegiatan: *Pengaspalan*. -Panjang : 0,750 KM -Lebar : 4 M	Baru	110
14	Pengaspalan Jalan Keliling (Ruas 670) di Kecamatan Bukitraya	Kegiatan: *Pengaspalan*: -Panjang : 1,2 KM -Lebar : 4 M	Baru	168
15	Pengaspalan Hotmix Jalan Dharma Bhakti dan Jalan Fajar (Ruas 460, 469) di Kecamatan Tampan	Kegiatan: *Pengaspalan Hotmix*: -Panjang : 2,5 KM -Lebar : 7 M *Pembuatan Parit Batu Kali*: -Panjang : 2.000 M	Baru	450

Lanjutan...

No	Proyek / Lokasi	Sasaran / Kegiatan	Tingkat Persiapan	Biaya
16	Pengaspalan Jalan Cumi-cumi Ambu-ambu I, Patin dan Jl. Mujair (Ruas 809, 649) di Kecamatan Bukitraya	Kegiatan: *Pengaspalan*: -Panjang : 1,5 KM -Lebar : 4 M	Baru	210
17	Pengaspalan Jalan Pandu dan Jalan Ikhlas (Ruas 897, 896) di Kecamatan Bukitraya	Kegiatan: *Pengaspalan*: -Panjang : 1,200 KM -Lebar : 4 M	Baru	168
18	Pengaspalan Jalan Pahlawan Kerja (Ruas 899) di Kecamatan Bukitraya	Kegiatan: *Pengaspalan*: -Panjang : 1,0 KM -Lebar : 4 M	Baru	140
19	Pengaspalan Jalan Bhakti (Ruas 960) di Kecamatan Tampan	Kegiatan: *Pengaspalan*: -Panjang : 2,0 KM -Lebar : 4 M	Baru	280
20	Pembuatan Parit Batu Kali Jalan Maranti dan Jalan Tiung (Ruas 487, 145) di Kecamatan Tampan	Kegiatan: *Pembuatan Parit Batu Kali*: -Panjang : 5.600 M	Baru	500
21	Pengaspalan Jalan Sialang Bungkuk (Ruas 540) di Kecamatan Bukitraya	Kegiatan: *Pengaspalan*: -Panjang : 1,5 KM -Lebar : 4 M	Baru	210
22	Pengaspalan Jalan Perkasa (Ruas 587) di Kecamatan Bukitraya	Kegiatan: *Pengaspalan*: -Panjang : 1,0 KM -Lebar : 4 M	Baru	140
23	Pengaspalan penetrasi jalan Bunga Raya dan Jl. Anggrek (Ruas 559, 560) di Kecamatan Bukitraya	Kegiatan: *Pengaspalan Penetrasi*: -Panjang : 0,750 KM -Lebar : 4 M	Baru	60
24	Pengaspalan Jl. Permata I (Ruas 461) di Kecamatan Tampan	Kegiatan: *Pengaspalan*: -Panjang : 1,0 KM -Lebar : 4 M	Baru	150
25	Biaya Umum Kotamadya Pekanbaru			300

Sumber: Dinas PU Kotamadya Pekanbaru.

Lampiran 3. **Perubahan Standar Harga Konstruksi 1997/98 dan 1998/99 (Rp.000).**

Kegiatan	Satuan	1997/98	1998/99	▲(%)**
A UPAII				
1. Kepala Tukang	Org/hari	12,5	20,0	60
2. Mandor	Org/hari	10,0	15,0	50
3. Pekerja	Org/hari	7,5	10,0	33
4. Penjaga Malam	Org/hari	6,0	10,0	67
B Perkerasan Berbutir				
1. Lapis pondasi Aggregate Klas A	m^3	43,0 - 65,0	100,0	85
2. Kayu pondasi Aggregate Klas B	m^3	40,0 - 55,0	82,2	73
3. Kayu pondasi Aggregate Klas C	m^3	28,0 - 35,0	80,2	155
4. Semen untuk SCB	ton	235,0 - 295,0	395,3	49
5. Tanah untuk SCB	m^3	17,0 - 28,5	34,5	52
C Pekerjaan Aspal				
1. Lapis resep pengikat	L	0,95 - 1,2	2,0	153
2. Lapis perekat	L	0,95 - 1,3	2,4	213
3. Latas ton (HRS)	m^2	8,0 - 9,0	21,4	152
4. Laston (AC)	m^2	9,0 - 10,5	22,1	127
5. Asphalt Treated Base (ATB)	m^3	218,0 - 225,0	522,0	136
6. Asphalt Treated Base Leneling (ATBL)	ton	95,0 - 103,0	-	-
D Pekerjaan Struktur				
1. Beton untuk struktur K-225	m^3	155,0 - 185,0	342,0	101
2. Beton tak bertulang	m^3	175,0 - 192,0	-	-
3. Baja tulangan	kg	1,7 - 2,2	3,4	74
4. Pasangan batu dengan adukan	m^3	115,0 - 140,0	-	-
5. Beton tak bertulang K-175	m^3	-	317,0	-
6. Gabion (Bronjong)	m^3	125,0 - 150,0	-	-
E Pekerjaan Minor				
1. Penanaman rumput	m^2	2,5 - 3,8	-	-
2. Pohon pelindung	btg	7,5 - 10,2	-	-
3. Marka jalan (cat biasa + glass bread)	m^2	24,0 - 30,0	46,0 *	70
4. Marka jalan (thermoplastic)	m^2	35,0 - 40,0	-	-
5. Rambu jalan	bh	90,0 - 105,0	-	-
6. Pembuatan/pemasangan rambu jln	m^2	-	-	-
7. Pembuatan patok kilometer	bh	-	-	-
8. Pembuatan / pemasangan patok pengarah	bh	-	-	-

Catatan * tidak membedakan antara cat biasa dengan thermoplastic.
** Dihitung dengan menggunakan harga rata-rata 1997/98

Sumber : Standar Harga Barang/Peralatan dan Jasa Untuk Keperluan Pemerintah Propinsi Dati I Riau Tahun 1997/1998 dan 1998/1999.

Lampiran 4. **Rekapitulasi LK Proyek Jalan Tahun 1998/99 (Rp. Juta).**

Seksi	Kegiatan	PROYEK*			
		1	2	4	5
1	Persiapan	6,6	5,2	5,7	5,7
2	Drainase	-	5,9	99,6	67,7
3	Pekerjaan Tanah	32,9	5,0	14,5	10,5
4	Subbose dan Base	63,3	7,9	24,8	22,7
5	Pelapisan Pemukiman Jalan	240,2	30,0	94,3	86,2
6	Bangunan-bangunan	-	-	5,2	1,1
7	Rehabilitasi jalan / jembatan	-	-	-	-
8	Lain - lain	-	-	3,9	2,8
	Jumlah	343,1	54,0	248,1	196,5
	PPN 10 %	34,3	5,4	24,8	19,7
	Penyediaan dana	377,4	59,4	272,9	216,2

Catatan * Nomor menunjukan proyek yang sama dengan Tabel 2.
Sumber : Dinas PU Kotamadya Pekanbaru.

Lampiran 5. **Lembaran Kerja Proyek Jembatan 1998/99.**

Seksi	Uraian	Biaya
1	Persiapan	5,2
2	Pekerjaan Tanah	26,6
3	Drainase untuk kontruksi	-
4	Pengendalian Sungai dan Perlindungan Talud	-
5	Pondasi untuk Konstruksi	125,6
6	Pekerjaan Beton	79,1
7	Pekerjaan Konstruksi Baja	-
8	Pekerjaan Konstruksi Kayu	-
9	Pasangan Batu Struktural	-
10	lain - lain	34,9
	Jumlah	271,3
	PPN 10 %	27,1
	Penyediaan dana	298,5

Sumber : Dinas PU Kotamadya Pekanbaru.

Lampiran 6. **Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan, Kondisi Jalan dan Kelas Jalan Kodya Pekanbaru, 1990-1991 (Km).**

Keadaan	1990	1991
A. Jalan Permukaan	733,57	739,57
1. Aspal	233,72	290,88
2. Kerikil	3,50	10,20
3. Tanah	496,35	438,38
B. Kondisi Jalan	733,57	739,57
1. Baik	168,43	174,43
2. Sedang	253,00	253,00
3. Rusak	312,14	306,14
C. Kelas Jalan	733,57	739,57
1. Arteri	83,40	83,40
2. Kolektor	8,53	8,57
3. Lokal	641,64	647,64

Sumber : RUTRK Pekanbaru 1994-2004. Tabel II.28, hal. II. 60.

Lampiran 7. **Perkembangan Panjang Jalan Kodya Pekanbaru Menurut Jenis Permukaan,Kondisi Jalan dan Kelas Jalan, 1989-1992 (Km).**

Jenis / Kondisi	1989	1990	1991	1992
A. Jalan Permukaan	**733,57**	**727,16**	**747,00**	**765,42**
1. Aspal	233,72	229,32	234,00	459,26
2. Kerikil	3,50	20,09	20,50	-
3. Tanah	496,35	367,01	374,50	306,17
4. Tidak diperinci		110,74	113,00	-
B. Kondisi Jalan	**733,57**	**727,16**	**747,00**	**765,42**
1. Baik	168,43	229,32	234,00	321,48
2. Sedang	253,00	387,10	395,00	137,33
3. Rusak	207,30	110,74	113,00	91,85
4. Rusak berat	104,84	-	5,00	214,76
C. Kelas Jalan	**733,57**	**727,16**	**747,00**	**765,42**
1. Arteri	83,40	-	-	103,30
2. Kolektor	8,53	-	-	0,24
3. Lokal	641,64	-	-	-
4. Tidak diperinci	-	727,16	747,00	661,88

Sumber : Repelita VI 1994/95. Buku III, hal. 77.

Lampiran 8. **Rencana Pembangunan Fasilitas Angkutan Jalan Raya Kodya Pekanbaru Selama Pelita VI.**

Jenis / Kondisi	Volume	Jumlah Dana (Rp. Juta)	Sumber Dana
1. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas.	466 unit	86,3	APBD Tk I
2. Pemasangan lampu penyeberangan.	6 unit	131,0	APBD I/ABT
3. Pengecekan marka penyeberangan.	1896,5 m2	41,7	APBD I
4. Perawatan terminal Mayang Terurai, Pembuatan papan trayek dan pembuatan jalan pemisah.	200 m2	45,0	APBD I
5. Pengerasan/penimbunan parkir terminal Zona Tampan.	1 ha	25,0	APBD I
6. Pembuatan pagar terminal oplet Senapelan.	175 m	65,0	APBD I
7. Pembuatan papan nama jalan.	188 unit	15,1	APBD I
8. Pembuatan Halte.	37 unit	314,5	APBD I, Sponsor
9. Pembangunan papan penunjuk jurusan angkutan kota.	25 unit	21,3	APBD I
Jumlah	-	**714,9**	-

Sumber : Repelita VI 1994/95- 1998/1999. Buku III, hal. 89.